



**TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA MAJELIS RAKYAT PAPUA BARAT
DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HAK-HAK DASAR ORANG ASLI
PAPUA DI MANOKWARI**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh :

ANDREAS MANUEL W. LESNUSSA
NIM. 11000119120156

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2023



**TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA MAJELIS RAKYAT PAPUA BARAT
DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HAK-HAK DASAR ORANG ASLI
PAPUA DI MANOKWARI**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh :

ANDREAS MANUEL W. LESNUSSA
NIM. 11000119120156

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2023

HALAMAN PENGESAHAN

**TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA MAJELIS RAKYAT PAPUA BARAT
DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HAK-HAK DASAR ORANG ASLI
PAPUA DI MANOKWARI**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh :

ANDREAS MANUEL W. LESNUSSA
NIM. 11000119120156

Penulisan hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I



Dr. Amalia Diamantina, S.H., M.Hum.
NIP. 196308201989032001

Pembimbing II



Sekar Anggun Gading Pinilih, S.H., M.H.
NIP. 198905212014042001

HALAMAN PENGUJIAN

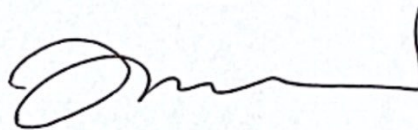
**TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA MAJELIS RAKYAT PAPUA BARAT
DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HAK-HAK DASAR ORANG ASLI
PAPUA DI MANOKWARI**

Dipersiapkan dan disusun
Oleh :

ANDREAS MANUEL W. LESNUSSA
NIM. 11000119120156

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 8 November 2023

Ketua



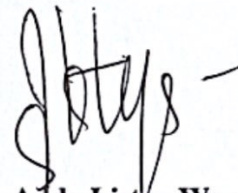
Dr. Amalia Diamantina, S.H., M.Hum.
NIP. 196308201989032001

Anggota Penguji I



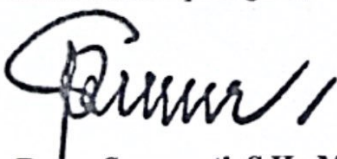
Sekar Anggun Gading Pinilih, S.H., M.H.
NIP. 198905212014042001

Anggota Penguji II



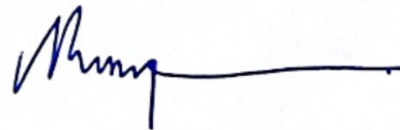
Prof. Dr. Lita Tyesta Addy Listya Wardhani S.H., M.Hum.
NIP. 196009261986032001

Mengesahkan :
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro,



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP. 196711191993032002

Mengetahui :
Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum



Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H.
NIP. 198407092008121002

SURAT PERNYATAAN

Dalam hal ini, saya nyatakan bahwa Penulisan Hukum dengan Judul **“TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA MAJELIS RAKYAT PAPUA BARAT DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HAK-HAK DASAR ORANG ASLI PAPUA DI MANOKWARI”** sejauh yang saya tahu, belum pernah diajukan atau dipublikasikan untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar sarjana di Perguruan Tinggi lainnya, sepanjang sepengetahuan saya tidak ada tulisan atau ide orang lain yang pernah diterbitkan atau dirujuk dalam naskah kecuali dari yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

Semarang, 9 Oktober 2023



Andreas Manuel W. Lesnussa

NIM 11000119120156

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apa pun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginan kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucap syukur. Damai sejahtera Allah, yang telah melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.”

– Filipi 4 : 6-7 –

“Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik! Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya.”

– Mazmur 136 : 1 –

Di mana ada hak, di sana ada kemungkinan menuntut, memperolehnya, atau memperbaikinya jika hak tersebut dilanggar.

– UBI JUS IBI REMEDIUM –

Penulisan Hukum ini penulis persembahkan kepada :

Tuhan yang Maha Esa,

Orang tua dan saudara terkasih,

Seluruh Dosen yang telah memelopori penulis,

Partner-partner terkasih penulis yang selalu ada,

Almamater serta Bangsa.

KATA PENGANTAR

Dengan segala puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus serta atas dukungan doa dari orang-orang tercinta sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum yang berjudul **“TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA MAJELIS RAKYAT PAPUA BARAT DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HAK-HAK DASAR ORANG ASLI PAPUA DI MANOKWARI”** dengan baik, lancar, dan tepat waktu.

Tujuan Penulisan Hukum ini ialah untuk melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan Program Sarjana Strata-1 (S1) Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang. Tentu saja selama proses Penulisan Hukum ini, penulis meminta dan menerima banyak sekali bantuan dari berbagai pihak telah membantu dan melopori. Tanpa mengurangi rasa terimakasih dan rasa hormat yang tulus, penulis ingin menyampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selalu Rektor Universitas Diponegoro.
2. Ibu Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
3. Bapak Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
4. Ibu Sekar Anggun Gading Pinilih, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan selaku Dosen Pembimbing II atas arahan, masukan, ilmu, serta segala sesuatu hal

diberikan untuk penulis agar penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini.

5. Bapak Suparno, S.H., M.Hum., selaku Dosen Wali yang telah mendampingi mempermudah, serta memberikan masukan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
6. Ibu Dr. Amalia Diamantina, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I atas ilmu, masukan, arahan, dan segala sesuatu yang diberikan terhadap penulis, sehingga penulis dapat mengerjakan Penulisan Hukum ini.
7. Ibu Prof. Dr. Lita Tyesta Addy Listya Wardhani S.H., M.Hum., selaku Dosen Penguji yang telah memberikan masukan dan arahan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
8. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan ilmu pengetahuan bidang hukum dan bidang lainnya kepada penulis.
9. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan yang selalu membantu dalam penyelesaian administrasi.
10. Lembaga Majelis Rakyat Papua Barat yang telah memberikan izin dan informasi yang bermanfaat bagi penulis dalam penyusunan Penulisan Hukum ini terutama Bapak Nimbrod Idjie S.Sos., M.AP., selaku Plt. Sekretaris dan para staf Bagian Umum Sekretariat MRPB.
11. Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat yang telah memberikan sambutan yang hangat dan informasi yang bermanfaat bagi penulis dalam penyusunan Penulisan Hukum terutama Bapak oleh George Karel Dedaida, S.Hut.,

M.Si., selaku Ketua Fraksi Otsus DPR Papua Barat dan para staf di Bagian Umum Sekretariat DPR-PB.

12. Orang tua tercinta, Alm. Arnold Lesnussa, S.H., M.H., dan Dr. Yohanna Y. R. Watofa, S.H., M.H., atas segala dukungan dan cinta kasih sayang yang telah diberikan selama ini, yang selalu memberikan apapun, baik dukungan secara moril dan materil maupun doa-doa yang dipanjatkan setiap hari untuk penulis agar tugas akhir ini segera diselesaikan.
13. Saudara-saudara tercinta yakni Bryan Watofa Lesnusa, S.Ked., Petronela Enggelina Lesnussa, Altenpflegerin., David Benyamin Lesnussa dan Ruth Fanesha Lesnussa atas segala dukungan dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
14. Princess Beverly Syaloom, S.M., terima kasih telah menjadi sosok partner, sahabat dan saudara yang spesial bagi penulis. Terima kasih telah berkontribusi banyak dalam Penulisan Hukum ini, memberikan dukungan, meluangkan waktu, mendengarkan keluh kesah serta memberikan tenaga, pikiran, dan materi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan Penulisan Hukum ini.
15. Teman – teman seperjuangan penulis; Achmad Rezki, S.H., Galang Sisdy Ramadhan, S.H., Dandito Yonatan Manurung., S.H., Adriel Benedict Hotnalom Saragih, S.H., Bintang A. Prawira, Dennish Febryansyah, Ismijzdiansyah Putra Vertiawan, S.H., Kartika Dwi Ajeng, S.H., Muhammad Juan Farrel, S.H., Kevita Stella Marmora, S.H., Dimas Wilda Pratama Antoni Putra, Faiz Azhar Hamzah, Faris Adli Munif, Zhafran Ariel

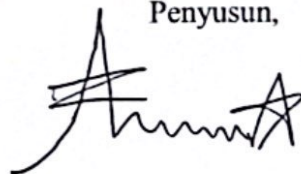
G., yang sudah menjadi teman seperjuangan penulis dari awal duduk di perkuliahan hingga saat ini dan saling berbagi dorongan semangat serta motivasi. Terima kasih telah berbagi waktu dan cerita serta menjadi tempat yang paling menyenangkan di masa perkuliahan ini. Semoga tali silaturahmi kita tetap terjaga untuk waktu yang lama.

16. Rekan – rekan satu jurusan Hukum Tata Negara Angkatan 2019, Badan Pengurus Harian dan Fungsionaris UKM-F Bola FH UNDIP 2022 serta seluruh rekan dan teman yang tidak dapat penulis tuliskan satu persatu terima kasih atas apapun yang kalian lakukan untuk mendukung penulis menyelesaikan tugas akhir, semoga Tuhan membalaskan semua yang telah kalian lakukan dan selalu diberikan perlindungan dariNya.

Akhir kata, penulis ingin terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan menginspirasi sepanjang Penulisan Hukum ini, namun terlalu banyak untuk disebutkan satu per satu. Oleh karena itu penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum ini masih jauh dari kata sempurna, maka penulis menyambut saran dan kritikan yang membangun. Hendaknya Penulisan Hukum ini mampu memberikan manfaat guna kepada pihak serta perkembangan hukum di Indonesia.

Semarang, 9 Oktober 2023

Penyusun,



Andreas Manuel W. Lesnussa

ABSTRAK

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut prinsip desentralisasi dan dipertegas dengan UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18B. Salah satunya provinsi Papua Barat, dasar hukum Otonomi khusus Provinsi Papua Barat diatur dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Terbentuknya lembaga Majelis Rakyat Papua Barat, merupakan representasi kultural Orang Asli Papua, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak Orang Asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama.

Permasalahan yang dibahas dalam Penulisan Hukum ini adalah bagaimana pelaksanaan perlindungan hak-hak dasar Orang Asli Papua oleh lembaga Majelis Rakyat Papua Barat di Manokwari dan faktor pendukung serta penghambat dalam upaya perlindungan hak-hak dasar tersebut.

Metode Penelitian dalam Penulisan Hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian yang menggunakan penelitian deskriptif dan Sumber data yang digunakan adalah dengan menggunakan data sekunder serta metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Sebagai pelengkap bahan hukum dilakukan dengan wawancara, yang kemudian dianalisis menggunakan metode berpikir secara deduktif.

Hasil dari pembahasan pelaksanaan perlindungan hak-hak dasar Orang Asli Papua oleh lembaga Majelis Rakyat Papua Barat di Manokwari adalah berdasarkan Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Tugas, Wewenang, Hak dan Kewajiban Majelis Rakyat Papua Barat, dalam rangka perlindungan hak-hak dasar Orang Asli Papua di berbagai bidang kehidupan yang meliputi memfasilitasi aspirasi OAP, bidang politik, bidang sosial, budaya dan sejarah, bidang kesehatan, bidang ekonomi serta bidang pendidikan; MRPB harus melakukan tindakan yang selaras samadengan yang sudah dimuatka di dalam Pasal 2 dan Pasal 27. Faktor penghambat atau kendala yang mempengaruhi upaya perlindungan hak-hak dasar Orang Asli Papua, sebagai berikut: 1). Kendala Majelis Rakyat Papua Barat sebagai Representasi Kultural Orang Asli Papua; 2). Kendala Hukum; dan 3). Kualitas Sumber Daya Manusia Papua. Sedangkan faktor pendukung dalam mempengaruhi upaya perlindungan hak-hak dasar Orang Asli Papua, yaitu 1). Hadirnya Otonomi Khusus dan Lembaga Majelis Rakyat Papua; 2). Pemberlakuan *Affirmative action*; dan 3). Hubungan Lembaga MRPB dengan Lembaga lainnya.

Kata Kunci: Pelaksanaan MRPB, Perlindungan Hak-Hak Dasar, Orang Asli Papua

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGUJIAN.....	iii
PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	14
C. Kerangka Pemikiran	15
D. Tujuan Penelitian	21
E. Manfaat Penelitian.....	21
F. Metode Penelitian.....	22
G. Metode Pengumpulan Data.....	25
H. Metode Analisis Data	25
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	26

A. Perlindungan Hukum.....	26
B. Hak-Hak Dasar.....	29
C. Orang Asli Papua	32
D. Majelis Rakyat Papua Barat.....	34
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Pelaksanaan Perlindungan Hak-Hak Dasar Orang Asli Papua Di Manokwari Oleh Lembaga Majelis Rakyat Papua Barat	38
1. Kedudukan Lembaga Majelis Rakyat Papua Barat	42
2. Tugas Dan Kewenangan Lembaga Majelis Rakyat Papua Barat ..	45
3. Perlindungan Hak-Hak Dasar Orang Asli Papua Di Manokwari Oleh Lembaga Majelis Rakyat Papua Barat	56
B. Faktor Penghambat Dan Faktor Pendukung Dalam Upaya Perlindungan Hak-Hak Dasar Orang Asli Papua	73
BAB IV PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA.....	83

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Presentase Penduduk Miskin	11
Tabel 2. Tingkat Pengangguran Terbuka	12
Tabel 3. Penerimaan Casis Bintara Reguler 2022-2023	69